

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kunarto, S.H.
Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Haryadi, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Selaku atasan pihak pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ketua
Pengadilan Negeri Bantul

Haryadi, S.H.
NIP. 19670118 199212 1 001

Bantul, 3 Pebruari 2015
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Bantul

Kunarto, S.H.
NIP. 19620823 198203 1 001

**PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2015**

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul
Tahun Anggaran : 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	85	Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan: - Penyelesaian Administrasi perkara di tingkat pertama - Penyelesaian perkara kurang dari 5 (lima) bulan	174.030.000
		b. Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan	90		
		c. Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan	90		
		d. Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan	90		
		e. Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan	85		
		f. Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan	85		
		g. Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan	90		
		h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan	90		
		i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan	90		
		j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan	95		
		k. Prosentase perkara pidana lalu lintas yang diselesaikan	100		
l. Prosentase perkara yang diselesaikan	80				

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM	ANGGARAN
		dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan			
		m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	15		
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85	Program: Peningkatan manajemen Peradilan Umum	
b. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	75				
c. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90				
d. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	90				
e. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85				
f. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80				
g. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90				
h. Prosentase Perkara Pidana yang tidak	95				

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM	ANGGARAN
		mengajukan upaya hukum Grasi			
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95	Program: Peningkatan manajemen peradilan umum Kegiatan: - Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama - Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi yg lengkap dan tepat waktu	
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	95		
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95		
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	90		
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90		
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	Program: Peningkatan manajemen peradilan umum Kegiatan : - Pos Pelayanan Hukum	
		b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	70		
		c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	90		
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	
6.	Meningkatnya kualitas	a. Persentase pengaduan	95	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM	ANGGARAN
	pengawasan	masyarakat yang ditindaklanjuti			
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100		

Jumlah Anggaran Kegiatan: Rp. 174.030.000 (seratus tujuh puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah)



Ketua
Pengadilan Negeri Bantul

Hariyadi, S.H.
NIP. 19670118 199212 1 001

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Bantul

Kunarto, S.H.
NIP. 19620823 198203 1 001